

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. (2009). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dwiarso, T. (2015). *Praktik Kenotariatan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamzah, Abdul. (2014). *Tanggung Jawab Notaris dalam Perubahan Akta*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, Yahya. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad, Salim. (2006). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyoto. (2012). *Perjanjian; Teknik Cara Membuat dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Pudjiwati, Reni. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Perubahan Akta Notaris*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320, Pasal 1329, dan Pasal 1868. Cetakan Ke-6. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 18.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.

C. Artikel atau Karya Ilmiah

Pudjiwati, Reni. (2017). *"Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Perubahan Akta Notaris: Celah Hukum dalam Pengawasan dan Penguatan Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris."* Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.